

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 BENGKAYANG
 NOMOR : 18 /SETDA/TAHUN 2021
 TANGGAL : 2021
 TENTANG :
 PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN POKOK/TEMPAT TUGAS
1	2	3
1.	ARJUNAIDI 19810612 201407 1 005 Pengatur Muda Tk.I/II-b	Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
2.	KRISANTUS, S.Sos. 19840726 201503 1002 Penata Muda Tk.I/III-b	Analisis Publikasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
3.	SATIRAH, SE. 19760806 201001 2 008 Penata Muda Tk.I/III-b	Analisis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
4.	Primayati, A.Md. 19711210 201402 2 002 Pengatur Tk.I/II-d	Pengelola Bahan Perencanaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5.	HERI SUHENDRY, SE. 19831212 201503 1 005 Penata Muda Tk.I/III-b	Analisis Investasi Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6.	YUNITHA NORMASARI, S.STP. 19940710 201609 2 001 Penata Muda Tk.I/III-b	Analisis Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
7.	EMELIA ERNA, SE. 19780418 200903 2 006 Penata Muda Tk.I/III-b	Analisis Klasifikasi Barang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
8.	ANDREAS IBEN 19700207 200604 1 013 Pengatur Tk.I/II-d	Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
9.	SENSUSIANA, SE. 19810813 200801 2 009 Penata Muda Tk.I/III-b	Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
10.	LUSIA IYUN, S.AP. 19780321 2007012 2 016 Penata Muda/III-a	Analisis Peraturan Administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG,

OBAJA, SE.,M.Si
 Pembina Utama Madya/IV-d
 NIP. 19620812 199203 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553

Fax. (0562) 441808, 441057

BENGKAYANG Kode Pos : 79282

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR: 18 /SETDA/TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembangkan sistem layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor

- 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengelolaan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Bengkayang melalui media yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyalurkan dan menyampaikan permohonan informasi dan/ atau pengaduan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu atau pihak lain sesuai kebutuhan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Organisasi penyelenggara;
 - e. melakukan evaluasi pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi secara berkala; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKAYANG
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBENGKAYANG,

OBAJA, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya/IV-d
NIP. 19620812 199203 1 013

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang, di Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.